



Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Yuni Amira¹, Dinda Kurnia², Harapan tua³

Program Studi Magister Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

Received: 3 Januari 2026

Revised: 13 Januari 2026

Accepted: 28 Februari 2026

The tourism development of Tanjung Punak Tourism Village, which won 1st Place at the Indonesian Tourism Village Award (ADWI) at the Riau Province level in 2023, faces serious challenges regarding sustainability post-award. This sustainability is highly dependent on the effectiveness of the Penta Helix Actor Network Model (Government, Community, Academia, Business, Mass Media), which serves as the foundation for Collaborative Governance. This study aims to analyze the model, actor roles, and network dynamics that influence the village's tourism sustainability. Using a descriptive qualitative method, the research identified that all Penta Helix elements are structurally complete. The findings indicate a disparity between strong resource support and governance dysfunction. The Facilitator role (Pertamina Hulu Rokan/Business and STP Riau/Academia) proved highly effective in providing CSR funding and capacity building. However, network effectiveness was paralyzed by a Critical Dysfunction in the Coordinator role (Bengkalis Regency Tourism Office). The Coordinator's failure to resolve the Tanjung Lapin management conflict between Primary Actors (the Office and Village Government/POKDARWIS) severed trust and the flow of routine support. This triggered implementor fatigue and the Implementor's failure to maintain facilities, marked by the poorly maintained condition of facilities. It is concluded that the effectiveness of the Actor Network in Tanjung Punak functions partially; the failure of the Coordinator role within the Government pillar is the fundamental obstacle that sabotaged the goal of tourism sustainability.

Keywords: Collaborative Governance, Development, Tourism Village, Penta Helix, Actor Network.

(*) Corresponding Author: yuni.amira6211@grad.ac.id¹, dinda.kurnia6309@grad.unri.ac.id², harapan.tua@lecturer.unri.ac.id³

How to Cite: Amira, Y., Kurnia, D., & Tua, H. (2026). Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.D), 233-241. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14215>

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata telah menjadi prioritas strategis pemerintah daerah, dengan fokus pada destinasi berbasis masyarakat seperti desa wisata (Purba, Yuniningsih, & Dwimawanti, 2021). Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, merupakan salah satu contoh



success story di Provinsi Riau, diakui secara regional setelah meraih Juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tingkat Provinsi Riau pada tahun 2023. Pengakuan ini mencerminkan tingginya potensi alam dan budaya serta keberhasilan mobilisasi aktor pada tahap awal.

Gambar 1. Desa Tanjung Punak juara 1 anugerah Desa Wisata



Sumber : Website Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, 2023.

Keberlanjutan sebuah desa wisata sangat bergantung pada jaringan aktor yang kuat dan terintegrasi. Secara teoritis, model pengembangan yang paling ideal adalah Penta Helix, yang mengharuskan sinergi aktif dari lima pilar utama: Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Bisnis/Swasta, dan Media Massa.

Di Desa Tanjung Punak, seluruh elemen Penta Helix secara struktural telah teridentifikasi:

1. Pemerintah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, UPT Pariwisata Kecamatan Rupat Utara, dan Pemerintah Desa.
2. Masyarakat: Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai pelaksana utama.
3. Akademisi: Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau.
4. Bisnis/Swasta: Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai penyedia dana Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Media Massa: GoRiau sebagai perwakilan media independen, serta unit komunikasi seperti PPID Bengkalis dan Media Center Riau.

Bagan 1. Aktor-Aktor yang terlibat



Meskipun memiliki struktur jaringan yang lengkap (*Penta Helix*), Desa Tanjung Punak pada tahun 2023 menghadapi masalah keberlanjutan yang signifikan, yang mengindikasikan adanya disfungsi dalam fungsi jaringan aktor:

- Kelemahan Implementasi: Sarana dan prasarana di objek wisata yang telah dibangun berada dalam kondisi kurang terawat. Beberapa infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah di objek wisata pantai Tanjung Lapin tetapi tidak difungsikan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengembangan desa wisata dibuktikan dengan UMKM yang tidak maksimal dibuktikan banyaknya stan kosong di objek wisata.
- Isu ini menunjukkan bahwa peran implementor (POKDARWIS dan Pemerintah Desa) serta koordinator (UPT Pariwisata dan Dinas Pariwisata) tidak berjalan efektif dalam fungsi pemeliharaan.
- Konflik Jaringan Primer: Ditemukan adanya konflik pengelolaan potensi wisata Tanjung Lapin yang melibatkan Pemerintah Desa/POKDARWIS di satu sisi, dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dan UPT Pariwisata di sisi lain. Konflik ini adalah bukti nyata bahwa interaksi dan koordinasi di antara aktor primer (yang memiliki pengaruh dan kepentingan tertinggi) terganggu. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas Jaringan Aktor yang terbentuk. Kehadiran aktor Bisnis (PHR) dan Akademisi (STP Riau) yang memberikan dukungan positif tidak mampu menutupi hambatan yang ditimbulkan oleh konflik di antara aktor Pemerintah dan Masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat krusial untuk menganalisis Model Jaringan Aktor di Desa Tanjung Punak, fokus pada bagaimana dinamika interaksi, konflik, dan peran masing-masing pilar dalam jaringan memengaruhi keberlanjutan pengembangan pariwisata.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Jejaring Kebijakan

Menurut Kenis dan Schneider (1991), jejaring kebijakan (policy network) dapat diuraikan dan dianalisis melalui tiga komponen dasar:

1. Aktor (*Actors*): Individu, kelompok, atau institusi yang berpartisipasi dalam jaringan.
2. Hubungan (*Linkages*): Bentuk interaksi, koneksi, atau keterikatan yang terjalin di antara para aktor.
3. Batas (*Boundary*): Ruang lingkup atau lingkup tematik yang membatasi sejauh mana aktor dan isu termasuk dalam jejaring tersebut.

Sabatier (disebutkan dalam Suwitri, 2005) mempelajari jejaring kebijakan dan merujuknya sebagai Aliansi Advokasi (*Advocacy Coalition*). Konsep ini merujuk pada sekelompok pembuat keputusan yang berada dalam subsistem kebijakan tertentu.

Kelompok dalam aliansi ini terdiri dari berbagai aktor dari instansi swasta dan pemerintah di berbagai tingkatan organisasi. Partisipasi mereka didasarkan pada kesamaan keyakinan dan upaya kolektif dalam mencapai tujuan tertentu.

Viney (melalui Suwitri, 2011) mengelompokkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ke dalam empat jenis berdasarkan matriks tingkat pengaruh

(influence) dan kepentingan (*interest*) yang mereka miliki. Klasifikasi ini juga menyarankan metode yang tepat untuk melibatkan setiap jenis aktor:

Tabel 1. Jenis Aktor dan Karakteristik

Jenis Aktor	Karakteristik (Pengaruh & Kepentingan)	Metode (Recruitment)	Pelibatan
Primer	Pengaruh besar dan sangat berkepentingan tinggi.	Melalui kemitraan (<i>partner</i>)	
Sekunder (Pertama)	Pengaruh besar tetapi memiliki kepentingan yang rendah.	Melalui konsultasi (<i>consult</i>)	
Sekunder Kedua/ Tersier	Pengaruh rendah tetapi memiliki tingkatan kepentingan yang besar.	Melalui informasi (<i>inform</i>)	
Sekunder Ketiga/ Kwartir	Pengaruh rendah dan memiliki kepentingan yang rendah.	Melalui pengendalian (<i>control</i>)	

b. Peran Aktor

Riant Nugroho (2012) mengelompokkan kedudukan atau peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam suatu program pembangunan ke dalam lima fungsi utama, yaitu:

1. Pembuat Kebijakan (*Policy Creator*): Pihak yang bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan tertinggi dan penentu arah resmi suatu program atau kebijakan.
2. Koordinator: Pihak yang bertugas menyelaraskan dan mengatur hubungan kerja antar semua pemangku kepentingan terkait agar program berjalan terpadu.
3. Fasilitator: Pihak yang berfungsi sebagai penghubung dan penyedia kebutuhan baik berupa wadah, sumber daya, maupun sarana yang diperlukan oleh kelompok sasaran atau pelaksana program.
4. Pelaksana (Implementor): Pihak yang memiliki tugas melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan dalam kebijakan atau program di lapangan, termasuk kelompok sasaran itu sendiri.
5. Akselerator: Pihak yang berfungsi untuk mempercepat pencapaian tujuan program dan memberikan kontribusi signifikan agar hasil program dapat diraih secara lebih cepat dan optimal dari target yang ditetapkan.

c. Model Jaringan Aktor

Menurut pemikiran yang dikembangkan oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law pada 1980-an (sebagaimana dikutip oleh Johannes Eka, 2013: 4), Model Jaringan Aktor (*Actor Network Theory/ANT*) merujuk pada struktur jaringan yang melibatkan berbagai pihak. Jaringan ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah aktornya, di mana setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab spesifik, yaitu:

1. Model *Triple Helix*: Melibatkan tiga aktor utama, biasanya diwakili oleh Akademisi (Universitas), Industri (Bisnis), dan Pemerintah.
2. Model *Quadruple Helix*: Merupakan perluasan dari *Triple Helix* dengan menambahkan pilar keempat, yaitu Masyarakat Sipil (selain Akademisi, Industri, dan Pemerintah).
3. Model Penta Helix: Model jaringan kolaboratif yang paling komprehensif, melibatkan lima pilar utama yang sering disingkat ABCGM: Academician (Akademisi), Business (Bisnis), Community (Komunitas/Masyarakat), Government (Pemerintah), dan Mass Media (Media Massa).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan Desa Tanjung Punak sebagai Lokasi Penelitian karena Desa Tanjung Punak merupakan salah satu desa wisata yang ditetapkan oleh bupati Bengkalis dalam Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 445/KPTS/VI/2021 tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Bengkalis. Data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah data primer (bersumber dari informan) dan data Sekunder (buku Pustaka, jurnal penelitian, catatan ilmiah serta laporan, arsip ataupun dokumen lainnya). Informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : jabatan fungsional pengembangan destinasi wisata DISPARBUDPORA Kab, Bengkalis, Kasi Tata Pemerintahan Kec. Rupa Utara, Kepala UPT Pengelola Pariwisata Pulau Rupa, Kepala Desa Tanjung Punak, Ketua POKDARWIS, Sekolah Tinggi Pariwisata Riau, dan Masyarakat Desa Tanjung Punak). Analisis data diterapkan secara interaktif melalui empat tahapan, dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data untuk memilah fokus, kemudian penyajian data dalam bentuk narasi, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Aktor Berdasarkan Tingkat Pengaruh Kepentingan

1. Aktor Primer

Aktor-aktor ini merupakan inti dari jaringan dan memiliki peran paling menentukan dalam implementasi dan keberlanjutan program pariwisata. Kegagalan sinergi di kelompok ini dapat melumpuhkan keseluruhan jaringan.

Tabel 2. Aktor Primer, pengaruh dan analisis peran

Aktor	Pengaruh	Analisis Peran
Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis	Tinggi (Pembuat kebijakan/ regulator)	Berperan sebagai Koordinator dan Pembuat Kebijakan (<i>Policy Creator</i>). Memiliki otoritas tertinggi untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur regulasi di tingkat Kabupaten.
Pemerintah Desa Tanjung Punak	Tinggi (Regulator dan Koordinator lokal)	Pemilik wilayah (regulator lokal) dan penyedia dukungan melalui Dana Desa. Sangat berkepentingan atas citra dan pendapatan desa.
Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	Tinggi (Implementor lapangan)	Memiliki peran Implementor dan Akselerator yang vital. Tanpa partisipasi aktif POKDARWIS, operasional harian dan pemeliharaan sarana tidak dapat berjalan.

2. Aktor Sekunder

Aktor-aktor ini memiliki sumber daya atau keahlian yang vital, sehingga keterlibatan mereka sangat menentukan kualitas dan akselerasi program, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam penetapan kebijakan harian.

Tabel 3. Aktor Sekunder, pengaruh dan analisis peran

Aktor	Pengaruh	Analisis Peran Kunci
Pertamina Hulu Rokan (PHR)	Tinggi (Penyedia sumber daya/dana)	Merupakan pilar Bisnis yang berperan sebagai Fasilitator utama melalui dana CSR. Pengaruhnya tinggi karena sumber daya finansialnya, yang menjadi penentu pembangunan fasilitas fisik dan pelatihan.
Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau	Sedang (Penyedia keahlian/konsultasi)	Pilar Akademisi yang berperan sebagai Fasilitator dan Akselerator pengetahuan. Memengaruhi kualitas SDM lokal melalui pelatihan teknis (capacity building).

3. Aktor Tersier

Aktor-aktor ini merupakan kelompok pendukung atau penerima manfaat yang berperan dalam lingkup teritorial terbatas atau hanya sebagai kelompok sasaran.

Tabel 4. Aktor Tersier, Pengaruh dan Analisis Peran

Aktor	Pengaruh	Analisis Peran Kunci
UPT Pariwisata Kecamatan Rupat Utara	Rendah (Hanya penghubung)	Berperan sebagai Akselerator dan penghubung di tingkat Kecamatan. Perannya terbatas pada dukungan administrasi dan pelaporan ke Kabupaten.
PPID Bengkalis, Media Center Riau, dan GoRiau.com	Rendah (Hanya saluran resmi)	Unit komunikasi pilar Pemerintah yang berperan sebagai Akselerator (Publikasi Resmi). Pengaruhnya terbatas karena hanya menyebarkan informasi satu arah dari pemerintah.
Masyarakat Umum (Pasif)	Rendah (Tidak terlibat pengambilan keputusan)	Berperan sebagai Kelompok Sasaran program. Kepentingan mereka tinggi sebagai penerima manfaat, tetapi pengaruhnya rendah dalam menentukan arah kebijakan.

Analisis Peran Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak

1. Peran Pembuat Kebijakan (*Policy Creator*)

Peran Pembuat Kebijakan terbagi antara Kabupaten dan Desa. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menjalankan peran ini dengan menetapkan kerangka hukum, program dan anggaran. Meskipun efektif secara formal, kebijakan ini seringkali dinilai tidak *feasible* oleh aktor pelaksana di lapangan. Di tingkat lokal, Pemerintah Desa Tanjung Punak juga berperan sebagai *Policy Creator* dengan mengintegrasikan program wisata ke dalam anggaran desa (APBDES), yang efektif secara lokal tetapi harus berhadapan dengan regulasi dari tingkat Kabupaten.

2. Peran Koordinator

Peran Koordinator adalah titik kegagalan utama dalam jaringan ini. Meskipun secara formal Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis adalah Koordinator utama, Dinas gagal menjalankan fungsi ini secara efektif. Kegagalan terbesar terlihat dari konflik pengelolaan potensi wisata Tanjung Lapin yang tak terselesaikan antara Dinas dengan *Implementor* lokal (Pendes/POKDARWIS).

Kegagalan Koordinator ini melahirkan kemacetan (*bottleneck*) komunikasi dan menghancurkan *trust* antar Aktor Primer, yang merupakan inti dari disfungsi jaringan.

3. Peran Fasilitator

Peran Fasilitator menunjukkan efektivitas tertinggi dan menjadi kekuatan jaringan.

- Pilar Bisnis (Pertamina Hulu Rokan/PHR) berfungsi Sangat Efektif sebagai Fasilitator finansial, berhasil menyediakan dana CSR untuk pembangunan sarana fisik dan kebutuhan pelatihan.
- Pilar Akademisi (STP Riau) berfungsi Sangat Efektif sebagai Fasilitator keahlian, sukses menyediakan pelatihan teknis (*capacity building*) yang sangat dibutuhkan POKDARWIS.
- Pemerintah Desa juga *Cukup Efektif* dalam memfasilitasi perizinan dan dukungan administrasi lokal.

4. Peran Pelaksana (*Implementor*)

Peran Pelaksana yang diemban oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) menunjukkan kinerja yang Efektif Namun Tidak Berkelanjutan. POKDARWIS berhasil melaksanakan operasional, tetapi gagal dalam pemeliharaan sarana pasca-pembangunan dan program tidak bertahan lama. Kegagalan Implementor ini sebagian besar disebabkan oleh dampak konflik dengan Koordinator, yang menyebabkan kelelahan implementor (*Implementor fatigue*) dan terputusnya dukungan dana rutin. Sementara Masyarakat

Pengelola (*homestay* dan usaha mikro) menunjukkan kinerja yang Efektif setelah mendapat Fasilitasi pelatihan.

5. Peran Akselerator

Peran Akselerator berjalan efektif dalam hal promosi dan dukungan birokrasi. Media Massa (GoRiau.com) berfungsi Efektif sebagai Akselerator promosi, memperluas jangkauan pasar desa secara luas. Sementara UPT Pariwisata Kecamatan Rupert Utara dan unit komunikasi Pemerintah (PPID/Media Center) berfungsi *Cukup Efektif* sebagai Akselerator administrasi dan publikasi resmi.

A. Model Penta Helix Dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak

Model *Penta Helix*, yang mencakup lima pilar utama: Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, dan Media Massa, merupakan kerangka kolaboratif ideal untuk pengembangan pariwisata. Analisis di Desa Wisata Tanjung Punak menunjukkan bahwa model ini terbentuk secara struktural tetapi gagal berfungsi secara fungsional akibat disfungsi peran Koordinator di pilar Pemerintah. Jaringan aktor di Tanjung Punak telah berhasil mengintegrasikan kelima pilar ini, memberikan fondasi kelembagaan yang kuat: Pilar Pemerintah diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis (*Policy Creator* dan Koordinator formal) dan Pemerintah Desa; Pilar Akademisi diwakili oleh Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau (*Fasilitator* ilmu/keahlian); Pilar Bisnis oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) (*Fasilitator* dana CSR); Pilar Komunitas oleh

POKDARWIS (*Implementor* utama); dan Pilar Media Massa oleh GoRiau.com serta unit komunikasi pemerintah (PPID/Media Center) (*Akselerator*). Secara teori, kelengkapan ini seharusnya menjamin sinergi, namun data lapangan menunjukkan kontradiksi.

Meskipun modelnya lengkap, efektivitas *Penta Helix* terhalang oleh disfungsi komunikasi dan koordinasi di tingkat Aktor Primer (Pemerintah dan Komunitas). Dinamika yang berhasil terjadi pada peran Fasilitator dan Akselerator, yang menjadi kekuatan jaringan. Pilar Bisnis (PHR) dan Akademisi (STP Riau) menjalankan peran mereka dengan efektivitas tinggi. PHR menyediakan sumber daya finansial yang signifikan, sementara STP Riau menyuntikkan pengetahuan dan keahlian melalui pelatihan. Kontribusi ini menunjukkan bahwa jaringan berhasil memenuhi kebutuhan *Implementor* akan dana dan *capacity building*. Selain itu, pilar Media Massa (terutama GoRiau) berhasil menjadi Akselerator dalam memublikasikan keberhasilan desa, mendukung brand awareness pasca-ADWI.

Evaluasi keberlanjutan outcome memperkuat temuan disfungsi ini. Meskipun Desa Tanjung Punak meraih penghargaan ADWI, outcome jangka pendek menunjukkan kegagalan keberlanjutan, ditandai dengan sarana prasarana yang kurang perawatan. Kegagalan ini adalah bukti langsung bahwa Akselerasi Promosi (oleh Media) dan dukungan Fasilitator (dari Bisnis/Akademisi) tidak mampu menutupi disfungsi tata kelola internal dan kegagalan peran *Implementor* yang dipicu oleh Konflik di tingkat Koordinator. Kesimpulannya, Model *Penta Helix* di Desa Tanjung Punak berfungsi secara parsial; meskipun pilar Fasilitator telah berkontribusi signifikan, disfungsi peran Koordinator di pilar Pemerintah telah menciptakan konflik yang melumpuhkan kemampuan *Implementor* dan menggagalkan tujuan keberlanjutan. Efektivitas jaringan tidak ditentukan oleh kelengkapan aktor, melainkan oleh kualitas interaksi dan resolusi konflik di antara Aktor Primer.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Model Jaringan Aktor dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Punak menunjukkan bahwa kerangka kolaboratif Model *Penta Helix* telah terbentuk secara struktural secara lengkap, melibatkan Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, dan Media Massa. Jaringan ini memiliki kekuatan signifikan pada peran Fasilitator dan Akselerator: Aktor Bisnis (Pertamina Hulu Rokan/PHR) dan Akademisi (STP Riau) berfungsi Sangat Efektif dalam menyediakan sumber daya finansial (dana CSR) dan keahlian (*capacity building*), yang sukses memenuhi kebutuhan *Implementor* akan dana dan pengetahuan.

Namun, keberhasilan struktural dan dukungan sumber daya ini gagal dipertahankan secara fungsional akibat Disfungsi Kritis pada peran Koordinator. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, sebagai Koordinator formal, gagal mengkoordinasikan dan menyelesaikan konflik pengelolaan potensi wisata Tanjung Lapin yang melibatkan Aktor Primer lainnya (Pemerintah Desa/POKDARWIS). Kegagalan ini melahirkan kemacetan komunikasi (*bottleneck*) dan menghancurkan trust antar pihak, sehingga melumpuhkan jaringan dari dalam.

Akibat langsung dari kegagalan Koordinator adalah kegagalan Implementor (POKDARWIS) dalam menjaga pemeliharaan sarana pasca-pembangunan, yang diperburuk oleh kelelahan implementor (Implementor fatigue) dan terputusnya dukungan rutin. Konsekuensinya, outcome jangka pendek program menunjukkan kegagalan keberlanjutan, ditandai dengan kurangnya perawatan pada sarana dan prasarana

Dengan demikian, disimpulkan bahwa Model Jaringan Aktor Penta Helix di Desa Tanjung Punak berfungsi secara parsial dan tidak stabil; efektivitas jaringan tidak ditentukan oleh kelengkapan aktor, melainkan oleh kualitas interaksi dan kemampuan resolusi konflik di antara Aktor Primer. Kegagalan peran Koordinator dalam pilar Pemerintah telah menjadi hambatan fundamental yang menggagalkan upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, R. (2012). *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surayaba.
- Pramesti, R., Krismartini, & Suwitri, S. (2021). Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. *Departemen Administrasi Publik*.
- Purba, G. P., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Model Jaringan Aktor dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Departemen Administrasi Publik Undip*, 1-25.
- Samiri, Muliani. (2019). Analisis Jaringan Aktor Dalam Implementasi Kebijakan: Teori dan Praktek. Diakses melalui <https://www.academia.edu/38579375/Analisis>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuliatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Al-Ijtima'i (International Journal Of Government and Social Science)*, 219-234.
- Trianggono, B., Wiloso, P., & Sasangko, G. (2018). Pariwisata dalam perspektif actor Network Teory (studi Kasus Top Selfie Pinusan Kragilan Desa Pogalan, Jawa Tengah, Indonesia). *Jurnal Pariwisata Pesona*.
- Yoeti, H. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero)
- Yunindyawati, Susanto, T. A., Lidya, E., Erlina, L., & Maulana. (2022). Pemetaan AKtor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Penyuluhan*, 307-322.
- Yuniningsih, T., T, D., & S, S. (2016). Model Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *Journal Of Public Sector Innovation (JPSI)*, 84.